

FOTO/ANT



POTENSI USAHA HIDROPONIK DI PESANTREN

Sejumlah santri mengecek tanaman red oakleaf dengan sistem hidroponik di Pesantren Ulul Ilmi, Jakarta Timur, Kamis (9/3). Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mendorong pesantren untuk mencetak para wirausahawan baru dengan mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming) yang memiliki potensi secara ekonomi.

41 Metropolis

SEJAK JANUARI 2023 BELUM GAJIAN

475 Guru Honorer PTK Non ASN di Depok Menderita

Akibat belum menerima bayaran selama tiga bulan, mereka mengaku terpaksa mengutang ke warung dan pinjam dari rentenir dengan bunga 20 persen buat kebutuhan sehari-hari, dan uang sekolah anak.

Pria yang sudah 6 tahun mengajar di SMAN 2 ini mengaku sangat sedih dengan kebijakan penundaan pembayaran gaji tersebut. Karena di tempat dia mengajar gaji per bulan itulah menjadi satu-satunya penghasilan yang dimiliki.

Akibat belum menerima bayaran selama tiga bulan, dia mengaku terpaksa mengutang ke warung dan pinjam dari rentenir dengan bunga 20 persen buat kebutuhan sehari-hari, dan uang sekolah anak.

Dirinya juga terpaksa menunggak pembayaran SPP anaknya yang bersekolah di swasta. Tak cuma itu, ponsel dia juga sudah tidak aktif lantaran kehabisan kuota. ABC, berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar membayarkan gaji guru honorer dan kasus keterlambatan pembayaran gaji guru tidak terulang kembali.

Guru PTK Non ASN lainnya DEF mengaku mengalami kesulitan keuangan, setelah tidak dibayarnya gaji sejak Januari 2023.

Dia juga terpaksa berutang di warung-warung maupun tetangga, untuk menambal kebutuhan sehari-hari. Anaknyanya yang sekolah di swasta kini sudah belum bayar SPP.

Ia khawatir anaknya tersebut dikhawatirkan karena tak bayar SPP. "Utang di warung itu sudah ratusan ribu. Untuk

membeli susu anak, lauk pauk dan beras," kata DEF, saat dihubungi di SMKN 1 Kota Depok.

Baik ABC dan DEF meminta pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang merupakan wadah atau forum perkumpulan kepala sekolah SMA dan SMK di Kota Depok untuk mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

"Kami harapan pimpinan MKKS menyampaikan keluhan ini supaya gaji guru honorer tingkat SMAN dan SMKN yang bersumber dari dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) segera dicairkan," tukas DEF.

Menyoal hal ini, Sekretaris MKKS SMAN Kota Depok, Usep Kasman mengatakan ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mempercepat proses administrasi yang dibutuhkan.

"Kasih para guru honorer kita. Mereka sudah bekerja maksimal tapi tiga bulan belum gajian. Apalagi, hari ini kebutuhan hidup semakin besar," ucap Usep.

Usep yang sekaligus Kepala SMAN 1 Kota Depok tersebut menuturkan, belum mendapat informasi mengapa honor para guru honorer yang bersumber dari BOSP itu, belum dibayarkan. Dia meminta Pemprov Jawa Barat mempercepat proses administrasi agar gaji guru honorer segera terbayar. ● yan

PENGUMUMAN RANCANGAN PEMISAHAN SEGMENT OPERASI MEDAN – BINJAI DAN BAKAUHENI – TERBANGGI BESAR



Inovasi Untuk Solusi
PT Hutama Karya (Persero)

(untuk selanjutnya disebut sebagai Perseroan)

Kantor Pusat :
Jl. M.T. Haryono Kav.8, RT.12 RW.11
Cawang, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340
Telepon : (021) 819 3708 Email : ptk@hutamakarya.com

Rancangan Pemisahan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta merupakan pemenuhan prinsip keterbukaan informasi terhadap rencana pemisahan segmen operasi Medan – Binjai dan Bakauheni – Terbanggi Besar.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) ("Perseroan") Pasal 4 ayat (1), (2), (4) dan (5) dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain untuk membentuk Anak Perusahaan serta Perseroan dapat mengalihkan hak pengusahaan jalan tol kepada Anak Perusahaan yang telah dibentuk tersebut ataupun mengalihkan seluruh atau sebagian saham Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut. Atas hal tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan pengalihan hak pengusahaan jalan tol kepada Anak Perusahaan Perseroan ("Pemisahan") yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan Perseroan pasca pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ("JTTS") tahap 1. Rencana Pemisahan ini akan dilaksanakan dengan pelaksanaan Pelepasan Saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan ("Divestasi") serta Kerja Sama Operasi dan Pembiayaan dengan Mitra Terpap.

II. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG AKAN MELAKUKAN TRANSAKSI

1. PIHAK YANG MELAKUKAN PEMISAHAN DAN PENGALIHAN OBJEK YANG DIPISAHKAN

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) ("PERSEROAN")

Perseroan didirikan dengan Akta No. 74 tanggal 15 Maret 1973, dibuat di hadapan Kartini Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA.53/004 tanggal 20 Agustus 1973, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengalihan Negeri, Jakarta tanggal 22 Agustus 1973, di bawah No. 3028, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 1 Februari 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10, Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana diumumkan dalam Akta No. 07 tanggal 16 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Achya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberlakukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Penerimaan Pembetulan/Pengubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0008/478 tanggal 19 Januari 2023.

Perseroan, yang melakukan kegiatan usaha utama di bidang industri konstruksi, pengusahaan jalan tol, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, pengembangan dan pengelolaan perusahaan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas, berdasarkan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. M.T. Haryono Kav.8, RT.12 RW.11, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia.

2. PIHAK YANG MENEMERIMA OBJEK YANG DIPISAHKAN

2.1 PT MEDAN BINJAI TOLL ("PTMB")

Umum
PTMB merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan di Kabupaten Deli Serdang dan berkantor pusat di Kantor Gerbang Tol Binjai di Megawati, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, yang anggaran dasarnya dibuat dalam Akta Nomor 48, tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Achya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dan Merkumham Republik Indonesia sesuai dengan surat Keputusan Nomor AHU-0053592-AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 10 Agustus 2022 ("Akta Pendirian PTMB").

PTMB melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang konstruksi, pengusahaan jalan tol, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, pengembangan dan pengelolaan perusahaan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham

Struktur pemodal PTMB berdasarkan Akta Pendirian PTMB adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	50.000	1.000	50.000.000
Modal Ditampikan dan Disetor	50.000	1.000	50.000.000
Susunan pemegang saham PTMB berdasarkan Akta Pendirian PTMB adalah sebagai berikut:			
Pemegang Saham			
	Jumlah Saham	%	
Perseroan	49.950	99,9	
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Hutama Karya (Persero)	50	0,1	
Total	50.000	100,0	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisari PTMB per tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan Akta Pendirian PTMB, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Muhammad Fauzan
Direktur : Yulandi

2.2 PT BAKAUHENI TERBANGGI BESAR TOLL ("PTBTB")

Umum
PTBTB merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan di Kabupaten Lampung Selatan dan berkantor pusat di Kantor Gerbang Tol Tiera Kota Baru di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Indonesia, yang anggaran dasarnya dibuat dalam Akta Nomor 49, tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Achya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dan Merkumham Republik Indonesia sesuai dengan surat Keputusan Nomor AHU-0053591-AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 10 Agustus 2022 ("Akta Pendirian PTBTB").

PTBTB melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang konstruksi, pengusahaan jalan tol, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, pengembangan dan pengelolaan perusahaan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham

Struktur pemodal PTBTB berdasarkan Akta Pendirian PTBTB adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	50.000	1.000	50.000.000
Modal Ditampikan dan Disetor	50.000	1.000	50.000.000
Susunan pemegang saham PTBTB berdasarkan Akta Pendirian PTBTB adalah sebagai berikut:			
Pemegang Saham			
	Jumlah Saham	%	
Perseroan	49.950	99,9	
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Hutama Karya (Persero)	50	0,1	
Total	50.000	100,0	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisari PTBTB per tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Akta No. 26 tanggal 21 Februari 2023 dibuat di hadapan Yuma Shabrina S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Achya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapat pengesahan dan Merkumham Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09.0096/388 tanggal 24 Februari 2023, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Agung Ardianto
Direktur : I Wayan Manda

III. INFORMASI TENTANG OBJEK YANG DIPISAHKAN

Pemisahan segmen operasi Medan – Binjai dan Medan – Bakauheni – Terbanggi Besar ke dalam PTBTB ("Objek Yang Dipisahkan") merupakan bagian dari pernyataan modal Perseroan kepada PTMB dan PTBTB. Pemisahan didasarkan dengan peralihan karena hukum atas sebagian aktiva dan pasiva Perseroan terkait dengan Objek Yang Dipisahkan.

Nilai pengalihan pemisahan Objek Yang Dipisahkan yang dijadikan persyaratan pada PTMB dan PTBTB mengacu kepada nilai wajar berdasarkan penilaian oleh penilaian independen. Kapasitas aktiva dan pasiva dan Objek Yang Dipisahkan akan diatur lebih lanjut dalam akta pemisahan.

Selanjutnya, sehubungan dengan pelaksanaan pemisahan tersebut, Perseroan akan melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalihan aktiva dan pasiva Objek Yang Dipisahkan ke dalam PTMB dan PTBTB tunduk pada dipadanya persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

A. INFORMASI MENGENAI JALAN TOL RUAS MEDAN – BINJAI

Berikut ini adalah informasi mengenai Ruas Medan – Binjai:

PPJT	Masa Konsesi	Informasi Keuangan Penting*	Keterangan
Akta PPJT No. 13 tanggal 27 Maret 2015	40 tahun mulai dari 2017 sampai dengan 2057	Nilai aset : 2.434 Miliar Rupiah Pendapatan usaha : 125 Miliar Rupiah Kewajiban : 462 Miliar Rupiah	Panjang Tol : 17,32 km

B. INFORMASI MENGENAI JALAN TOL RUAS BAKAUHENI – TERBANGGI BESAR

Berikut ini adalah informasi mengenai Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar:

PPJT	Masa Konsesi	Informasi Keuangan Penting*	Keterangan
Akta PPJT No. 9 tanggal 4 September 2015	40 tahun mulai dari 2019 sampai dengan 2059	Nilai aset : 17.159 Miliar Rupiah Pendapatan usaha : 767 Miliar Rupiah Kewajiban : 8.812 Miliar Rupiah	Panjang Tol : 141 km

*Nilai aset berdasarkan Penilaian Hak Kepemilikan Finansial dengan tanggal penilaian 31 Desember 2022 oleh KJPP Tona Oky Heru & Rekan. Nilai kewajiban berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (Unaudited) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

IV. ALASAN DAN PENJELASAN DILAKUKANNYA PEMISAHAN SERTA MANFAAT DILAKUKANNYA PEMISAHAN

A. ALASAN DAN PENJELASAN DILAKUKANNYA PEMISAHAN

Dari sisi Perseroan yang melakukan pemisahan terdapat faktor pendorong dilakukannya pemisahan yaitu pasca pembangunan dan operasional beberapa ruas JTTS tahap 1, terdapat indikasi dimana Perseroan berpotensi mengalami kondisi keuangan yang tidak sustainable. Eksposur nilai kewajiban keuangan Perseroan, seperti pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang signifikan, akan membatasi performa keuangan Perseroan serta tidak optimalnya performa dan operasional JTTS tidak dapat memfasilitasi Perseroan dalam mengukuhkan keuangan. Dengan tujuan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan ketriagial yang lebih sustainable, Perseroan mempertimbangkan untuk melakukan pemisahan pada beberapa ruas JTTS. Perseroan berpersasi dimana dana yang didisipkan dari hasil kerjasama dengan mitra potensial dapat digunakan menurunkan beban keuangan terkait pembangunan JTTS ke tingkat sustainable dan memperbaiki kondisi over-leveraged Perseroan saat ini.

B. MANFAAT DILAKUKANNYA PEMISAHAN

Pemisahan diharapkan akan memberi sejumlah manfaat sebagai berikut:

- Dengan dilakukannya insisif pemisahan ini, diharapkan Perseroan dapat mengurangi posisi utang dan beban bunga perusahaan bisa kembali ke tingkat yang lebih sustainable.
- Pemisahan berpotensi untuk mengurangi beban bunga Perseroan dan meningkatkan margin ke tingkat yang sustainable.

V. RINGKASAN PERACAKAN KEUANGAN DAN LAPORAN LABA RUGI

A. PERSEROAN

Posisi Keuangan Perseroan	dalam Rp. Juta		
	2020 Audited	2021 Audited	2022 Unaudited
Asat Lancar	22.484.743	28.286.904	40.926.921
Asat Tidak Lancar	91.626.736	104.710.599	116.510.205
Total Asat	114.111.479	132.997.503	157.437.126
Liabilitas Jangka Pendek	41.020.311	26.708.953	19.578.338
Liabilitas Jangka Panjang	41.096.343	51.399.900	53.231.141
Total Liabilitas	82.116.654	78.108.753	72.809.479
Total Ekuitas	31.994.825	54.888.750	84.627.647
Total Liabilitas & Ekuitas	114.111.479	132.997.503	157.437.126
Laporan Laba Rugi Perseroan			
dalam Rp. Juta			
	2020 Audited	2021 Audited	2022 Unaudited
PENDAPATAN			
Pendapatan Tol	1.214.699	2.739.467	3.300.138
Pendapatan Usaha Lainnya	1.008.100	1.085.079	1.522.527
Pendapatan Konstruksi	20.288.233	20.660.452	19.385.873
Total Pendapatan	23.411.032	24.484.998	24.208.538
BEBAN PENDAPATAN			
Beban Tol dan Usaha Lainnya	(2.350.743)	(2.773.800)	(3.560.144)
Beban Konstruksi	(19.134.299)	(15.359.806)	(17.047.792)
Jumlah	(21.485.042)	(18.133.606)	(20.607.935)
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.915.990	2.351.392	3.600.603
LABA BRUTO	1.915.990	2.351.392	3.600.603
Penghasilan Lain-lain	66.030	170.220	138.374
Penghasilan Keuangan	682.154	202.827	256.269
(Beban) Umum dan Administrasi	(1.198.674)	(686.272)	(611.873)
(Beban) Lain-lain	(775.977)	(1.075.432)	(758.069)
(Biaya) Keuangan – Hak Guna Usaha Neto	(2.554.192)	(3.167.109)	(3.917.740)
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(1.884.689)	(2.204.374)	(1.290.436)
B. RUAS MEDAN – BINJAI			
Posisi Keuangan			
	2020 Audited	2021 Audited	2022 Unaudited
Asat Lancar	145.234	1.816.124	417.700

Aset Tidak Lancar	2020 Audited	2021 Audited	2022 Unaudited
		2.690.014	2.753.231
Total Asat	2.835.248	4.571.355	3.433.807
Liabilitas Jangka Pendek	407.862	46.154	18.665
Liabilitas Jangka Panjang	1.210.246	1.573.295	443.342
Total Liabilitas	1.618.108	1.619.449	462.207
Total Ekuitas	1.217.140	2.951.906	2.971.600
Total Liabilitas & Ekuitas	2.835.248	4.571.355	3.433.807

	31 Desember		
	2020 Audited	2021 Audited	2022 Unaudited
PENDAPATAN			
Pendapatan Tol	64.343	96.733	123.249
Pendapatan Usaha Lainnya	-	-	-
Pendapatan Konstruksi	464.262	40.948	2.119
Total Pendapatan	528.605	137.681	125.368

	31 Desember		
	2020 Audited	2021 Audited	2022 Unaudited
BEBAN PENDAPATAN			
Beban Tol dan Usaha Lainnya	42.825	54.314	(74.968)
Beban Konstruksi	448.219	40.948	(2.119)
Jumlah	491.045	95.262	(76.204)

LABA BRUTO	2020 Audited	2021 Audited	2022 Unaudited
		37.560	42.419

Penghasilan Lain-lain	2020 Audited	2021 Audited	2022 Unaudited
		-	-
Penghasilan Keuangan	-	4	2
(Beban) Umum dan Administrasi	-	-	-
(Beban) Lain-lain	-	-	-
(Biaya) Keuangan – Hak Guna Usaha Neto	(36.069)	(36.556)	(24.043)
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.491	5.867	25.147

Posisi Keuangan	dalam Rp. Juta		
	2020 Audited	2021 Audited	2022 Unaudited
Asat Lancar	576.611	78.519	233.445
Asat Tidak Lancar	17.165.673	17.216.615	16.935.722
Total Asat	17.742.284	17.295.133	17.169.171
Liabilitas Jangka Pendek	694.244	436.536	456.199
Liabilitas Jangka Panjang	8.283.982	8.359.928	8.355.882
Total Liabilitas	8.978.226	8.796.464	8.812.081
Total Ekuitas	8.764.057	8.498.269	8.357.090
Total Liabilitas & Ekuitas	17.742.284	17.295.133	17.169.171

Posisi Keuangan	dalam Rp. Juta		
	2020 Audited	2021 Audited	2022 Unaudited
Asat Lancar	576.611	78.519	233.445
Asat Tidak Lancar	17.165.673	17.216.615	16.935.722
Total Asat	17.742.284	17.295.133	17.169.171
Liabilitas Jangka Pendek	694.244	436.536	456.199
Liabilitas Jangka Panjang	8.283.982	8.359.928	8.355.882
Total Liabilitas	8.978.226	8.796.464	8.812.081
Total Ekuitas	8.764.057	8.498.269	8.357.090
Total Liabilitas & Ekuitas	17.742.284	17.295.133	17.169.171

Posisi Keuangan			
-----------------	--	--	--